

Sekretariat Presiden Kembalikan Naskah Asli Teks Proklamasi ke ANRI

JAKARTA (KR) - Sekretariat Presiden mengembalikan naskah asli Teks Proklamasi, yang dihadirkan pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Selasa (17/8) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Sebagaimana informasi yang disampaikan Biro Pers Sekretariat Presiden, proses pengembalian naskah asli Teks Proklamasi tersebut dilakukan Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden Sony Kartiko kepada Direktur Preservasi ANRI Kandar, yang berlangsung di Gedung O, ANRI Jakarta Selatan, Rabu (18/8).

Kegiatan ini turut disaksikan Kepala Biro Umum Sekretariat Presiden, Erry Hermawan dan Plh Kepala Biro Umum ANRI, Dipo Winarto. Sebelumnya, naskah bertulis tangan Sang Proklamator Ir Soekarno tersebut dibawa dari tempat penyimpanan di Istana Merdeka menuju ANRI untuk kemudian dilakukan serah terima dan kembali mendapatkan perawatan terbaik.

Menurut catatan sejarah, naskah asli Teks Proklamasi tersebut diselamatkan dan disimpan oleh seorang tokoh pers dan pejuang kemerdekaan, BM Diah, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Soeharto. Selanjutnya, naskah tersebut diteruskan kepada Menteri Sekretaris Negara 1988-1998, Moerdiono.

Pada tahun 1992, Moerdiono menyerahkan dokumen bersejarah tersebut kepada ANRI untuk disimpan dan dirawat dengan baik hingga saat ini. (Ant)-f



KR-Sekretariat Kepresidenan

Pengembalian naskah asli Teks Proklamasi dari Sekretariat Presiden kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Gedung O, ANRI, Jakarta, Rabu (18/8).

KASUS HARIAN DI DIY TURUN Taati Tarif Tes PCR

YOGYA (KR) - Pemda DIY minta pengelola rumah sakit dan laboratorium di DIY untuk mematuhi dan mengikuti ketentuan Pemerintah Pusat mengenai penurunan tarif atau biaya tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19. Dengan diturunkannya tarif ini, diharapkan masyarakat tetap mendapatkan layanan secara baik, dan beban mereka pun berkurang.

"Saya minta rumah sakit dan laboratorium di DIY bisa mentaati ketentuan yang sudah ada. Untuk detailnya Menteri Kesehatan segera membuat aturan tentang batas maksimal (batas harga). Kita ikuti saja aturan yang dibuat Kemenkes," kata Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di kantornya, Rabu (18/8).

Baskara Aji mengungkapkan, kewenangan soal tarif itu memang lebih banyak ada di Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkes. Untuk itu pihaknya belum mengetahui secara detail aturannya, termasuk soal kecepatan hasil (waktu pemeriksaan sampai diketahui hasilnya) menjadi pertimbangan dalam penentuan harga.

Sementara itu kasus konfirmasi positif Covid-19 di DIY secara harian menunjukkan penurunan signifikan. Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji mengatakan kasus kesembuhan lebih tinggi dibandingkan penambahan kasus baru terkonfirmasi. Terdapat penambahan kasus sembuh harian 2.311 sehingga total sembuh menjadi 113.768 pada Rabu (18/8).

"Angka kesembuhan terus mengalami peningkatan setiap harinya, tetapi masyarakat harus tetap waspada dan tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan," katanya.

* Bersambung hal 7 kol 1

Analisis KR
Pertumbuhan 11,8%
Prof Dr Mudrajat Kuncoro

PEREKONOMIAN DIY triwulan II-2021 tumbuh 11,8% terhadap triwulan II-2020. Ini mencengangkan di tengah diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Rekor pertumbuhan ekonomi setinggi ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah DIY, bahkan jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang 7,07%.

* Bersambung hal 7 kol 1

Tanggal	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Kamis, 19 Agustus 2021	11:46	15:06	17:42	18:52	04:29

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DOMPET 'KR'
Bersama Kita Melawan Virus Korona
Migunani Tumraping Liyan

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA **126.556.5656** atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA **081 2296 0972**).

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

NO	NAMA	ALAMAT	RUPIAH
	Melalui Transfer		
118	Paguyuban Alumni SMP II IKIP Pakem 1966 (PASKIP 66) .		1,000,000.00
	JUMLAH		Rp 1,000,000.00
	s/d 17 Agst 2021		Rp 497,374,656.00
	s/d 18 Agst 2021		Rp 498,374,656.00

(Empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)

(Siapa menyusul?)

Kebebasan Berpendapat Meningkat, Berkumpul Turun

Indeks Demokrasi DIY Naik di Tengah Pandemi

YOGYA (KR) - Di tengah pandemi Covid-19 melanda, yang membuat aktivitas masyarakat terbatas, indeks demokrasi Indonesia (IDI) DIY tahun 2020 mengalami peningkatan 0,92 persen dari tahun sebelumnya. Dari keterangan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) di website, Rabu (18/8) terungkap IDI DIY tahun 2020 sebesar 81,59 (peringkat 4 nasional) meningkat dari tahun 2019 sebesar 80,67 (peringkat 7). Sedangkan peringkat 1 ditempati DKI Jakarta. Dari laporan BPS itu menyebutkan aspek yang

menyebabkan kenaikan indeks tersebut, diantaranya aspek kebebasan sipil yang naik 3,57 poin menjadi 96,46, aspek lembaga demokrasi naik 0,59 poin menjadi 70,54. Sedangkan aspek hak politik di 80,43 atau turun 2,56 poin.

Dalam laporan IDI tersebut, terdapat 11 variabel penilaian IDI. Dari jumlah itu, terdapat 5 indeks variabel yang mengalami kenaikan, yakni hak memilih dan dipilih, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, peran birokrasi pemerintah dan kebebasan

berpendapat. Sedangkan 3 indeks variabel yang tetap, yakni pemilu yang bebas dan adil, peran partai politik dan peran peradilan yang independen. Namun terdapat 3 indeks variabel yang mengalami penurunan, yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, peran DPRD serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Menanggapi capaian tersebut, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengemukakan, secara umum IDI tahun 2020 di DIY naik dibanding ta-

hun-tahun sebelumnya. Namun demikian, di tengah pandemi Covid-19, perlu peningkatan partisipasi masyarakat khususnya dalam kebijakan pembangunan dan secara khusus dalam penanggulangan Covid-19. "Partisipasi itu sangat penting terutama dalam kebijakan

*** Bersambung hal 7 kol 1**

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) 2020 DIY NAIK 0,92 POIN

3 Aspek IDI tahun 2020 terhadap tahun 2019 :

- Aspek Kebebasan Sipil: **96,46** (+3,57 Poin)
- Aspek Hak-Hak Politik: **80,43** (-2,56 Poin)
- Aspek Lembaga Demokrasi: **70,54** (+0,59 Poin)

IDI : Indeks Demokrasi Indonesia | Grafik : Aho

PEKERJA DAN PELAKU USAHA KRITISI PPKM Beban Makin Berat, Dibutuhkan Stimulus

YOGYA (KR) - Para pekerja berbagai sektor dan pelaku usaha di DIY mengkritisi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dinilai semakin memberatkan beban di tengah himpitan pandemi Covid-19 ini.

Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) DIY bahkan mendesak Pemerintah Pusat untuk menghentikan PPKM. Kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 ini dirasa justru membuat rakyat semakin terpuruk.

"PPKM berdampak tutupnya sektor wisata, pusat keramaian, pendidikan sekolah dan kampus, pusat-pusat perbelanjaan, bangkrutnya para pedagang pasar, sulitnya kondisi hotel



KR-Juvinarto

Aksi menolak PPKM oleh K-SBSI di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta.

dan restoran, dan jatuhnya omzet pedagang kuliner yang menimbulkan penderitaan luar biasa," tegas Ketua Serikat Buruh K-SBSI DIY Dani Eko Wiyono ST MT di sela aksi bersama, Rabu (18/8) di Titik Nol

Kilometer Yogyakarta. Aksi diikuti terbatas 200-an peserta dari unsur buruh, pekerja pabrik, pekerja seni budaya, pekerja sektor pariwisata, pekerja sektor pendidikan, dan pengusaha kuliner.

* Bersambung hal 7 kol 1

SEJAK 17 OKTOBER 2019 TAK LAGI KE MUI Daftar Sertifikasi Halal ke BPJPH Kemenag

JAKARTA (KR) - Sejak 17 Oktober 2019, lembaga yang memberikan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Kewenangan BPJPH ini, sejalan dengan amanat Pasal 72 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Demikian keterangan Pelaksana Tugas (Plt) BPJPH Kemenag Mastuki di Jakarta, Rabu (18/8). "Jadi, perusahaan dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan mengajukan pendaftaran perdana (baru) atau perpanjangan (renewal) harus melalui BPJPH," ujar Mastuki merespons perta-

nyaan tentang skema perusahaan dari luar negeri yang akan mengajukan pendaftaran sertifikasi halal ke Indonesia.

Menurut Mastuki, perusahaan (company), baik dalam maupun luar negeri, yang mengajukan sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum 17 Oktober 2019, masih dibenarkan sesuai regulasi.

* Bersambung hal 7 kol 5

SUNGGUH Terjadi

● **KETIKA** saya mendapatkan undangan pelatihan UMKM di kantor kelurahan, saya langsung mengisi buku tamu, mengambil snack, makan siang dan diberi uang transpot. Setelah mengikuti pelatihan sampai selesai, saya tidak nyambung karena materi yang disampaikan tidak saya pahami. Ternyata saya salah masuk ke ruang untuk kegiatan calon anggota legislatif. Saya kemudian mengikuti acara itu sampai tiga hari. (Iswari, Bantarjo RT 02 RW 27 Donoharjo, Ngaglik Sleman)-f

UNTUK memudahkan pengiriman naskah SST bisa melalui e-mail: www.nas-kahkr@gmail.com atau WA 0895-6394-11000, ditulis Naskah SST.

Bagi yang sedang isoman, tapi ingin konsultasi dokter

DOCCALL
Konsultasi Dokter Melalui Video Call
HOTLINE : 08112854035

RS PKU Bantul

KONSULTASI DOKTER ONLINE

Pendaftaran ☎ 08123 638 678

Pakai masker, jaga jarak, interaksi lebih aman dan sehat. Ingat 5M

ILUSTRASI JOS

DATA KASUS COVID-19 Rabu, 18 Agustus 2021

1. Nasional:	2. DIY:
- Pasien positif : 3.908.247 (+15.768)	- Pasien positif : 140.900 (+634)
- Pasien sembuh : 3.443.903 (+29.794)	- Pasien sembuh : 113.768 (+2.311)
- Pasien meninggal : 121.141 (+1.128)	- Pasien meninggal : 4.403 (+33)

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Pemda DIY. (KR-Rial/fra)